KUASA KIAI DALAM PEMAKNAAN POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:
TSANIYATUL AZIZAH
08370009

PEMBIMBING:

1. **Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M. A.**
2. **Dr. H. M. NUR, S.Ag., M. Ag.**

JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012

ABSTRAK

Dilihat dari sejarahnya, Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) muncul sebagai jawaban terhadap usulan warga Nahdlatul Ulama(NU) dari seluruh pelosok negeri yang menginginkan hadirnya satu wadah yang dapat menampung aspirasi politik kaum *Nahdliyyin*. Keinginan itu direspon oleh Pengurus Besar NU(PBNU) yang kemudian membidani lahirnya PKB dan segera membentuk PKB di tingkatan propinsi, salah satunya Daerah Istimewa Yogyakarta. PKB ini lahir melalui sebuah rangkaian proses pengkajian yang intensif. Ia tumbuh menjadi partai yang bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka bagi siapa saja dalam artian lintas agama, suku, ras dan golongan, berciri humanisme religious (*insaniyah diniyah*) dan amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis dan berwawasan kebangsaan. Dalam perjalanan politiknya, PKB DIY mengalami penurunan jumlah suara dalam keikutsertaannya di Pemilu. Selain itu, PKB sebagai partai yang didirikan para ulama NU ternyata menyimpan potensi konflik. Perpecahan demi perpecahan merupakan fakta tak terbantahkan.Dalam setiap episode konflik berimbas pada keberadaan kiai, baik yang ada dalam struktur PKB maupun yang berada di luar struktur partai. Karena itu, maka penyusun tertarik untuk meneliti bagaimanakah kuasa kiai dalam pemaknaan PKB di DIY.

Jenis penelitian yang digunakan oleh adalah penelitian lapangan *(Field research).* Dengan metode wawancara beberapa kiai yang PKB DIY. Adapun metode yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif yang bersifat kualitatif. Data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang (subyek penelitian). Pendekatan masalah yang digunakan dalam memaparkan data-data dalam skripsi ini adalah metode pendekatan historis- sosiologis. Pendekatan historis ini melihat latar belakang sejarah bagaimana berdirinya PKB yang kemudian digabungkan dengan pendekatan soisologis

Dari penelitian dan pengumpulan data, dapat diketahui bahwa ,*pertama* di DIY kiai tetap memiliki kuasa dalam PKB. Ini dikarenakan kultur PKB DIY masih sama dengan NU pada umumnya. Namun, tidak semua kiai memiliki kekuasaan untuk memutuskan/ memberi kebijakan partai. *Kedua*, Kekuasaan kiai dalam PKB di DIY ini simetris (seimbang) tidak terlihat adanya superordinasi dan subordinasi. Sehingga kekuasaan kiai di PKB ini tidak mutlak. Setiap kebjakan selalu ada kordinasi yang baik antara Dewan Syura dan Dewan Tanfidz. *Ketiga*, peran kiai dalam PKB DIY ada tiga bentuk. Sebagai aktor, pendukung dan sebagai partisipan. Sebagai aktor, kiai langsung terjun ke dalam garis perjuangan PKB, misalnya dalam kelahiran PKB DIY. Selanjutnya sebagai pendukung maksudnya pada peran ini, kiai mendukung terhadap PKB, namun tidak berada di garis depan dalam memperjuangkan PKB DIY. Selanjutnya yakni sebagai partisipan, adalah kiai memberikan restu terhadap calon tertentu, dan tidak terlibat dalam aksi dukungan, atau menjadi tim sukses. Jadi tidak semua kiai fokus pada PKB DIY, kebanyakan kiai tersebut lebih memilih fokus pada pesantren yang diasuhnya.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di-
Yogyakarta

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tsaniyatul Azizah
NIM : 08370009
Judul : Kuasa Kiai dalam Pemaknaan Politik Partai Kebangkitan Bangsa di Daerah Istimewa Yogyakarta

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 29 Sya'ban 1433 H
24 Juli 2012 M

Pembimbing I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.A.
NIP: 19731105 199603 1 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di-
Yogyakarta

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tsaniyatul Azizah
NIM : 08370009
Judul : Kuasa Kiai dalam Pemaknaan Politik Partai Kebangkitan Bangsa di Daerah Istimewa Yogyakarta

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 29 Sya'ban 1433 H
24 Juli 2012 M

Pembimbing II

Dr. H. M. Nur. S. Ag,. M. Ag.
NIP: 19700816 199703 1 002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

Jln Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Tsaniyatul Azizah
NIM	: 08370009
Jurusan	: Jinayah Siyasah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Juli 2012
Yang menyatakan

Tsaniyatul Azizah
08370009

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

Jln Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

www.tuv.com
TÜVRheinland
ID 9105052579

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN. 02/DHS/PP.00.9/219/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul	: KUASA KIAI DALAM PEMAKNAAN POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Yang dipersiapkan dan disusun oleh:	
Nama	: Tsaniyatul Azizah
NIM	: 08370009
Telah dimunaqasyahkan pada	: 18 Juli 2012
Dengan nilai	: 90 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Dr.Ahmad Yani Anshori, M.A.
NIP: 19731105 199603 1 002

Penguji I

Subaidi, S. Ag., M. Si.
NIP 19750517 200501 1 004

Penguji II

Drs. Ahmad Pattiroy, M. Ag.
NIP. 19600327 199203 1 003

Yogyakarta, 18 Juli 2012

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph. D
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ’	b	be
ت	Tâ’	t	te
ث	Sâ’	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ’	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ’	f	ef
ق	qâf	q	qi
	kâf	k	ka
	lâm	l	`el

ك	mîm	m	`em
ل	nûn	n	`en
م	wâwû	w	w
ن	hâ’	h	ha
و	hamzah	’	apostrof
هـ	yâ’	Y	ye
ء			
ي			

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعّددة	Ditulis	Muta‘addidah
عدّة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامةالأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاةالفطر	Ditulis	Zakâh al-fiţri

D. Vokal pendek

__َ_ فعل __ِ_ ذكر __ُ_ يذهب	Fathah kasrah dammah	ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis	A fa'ala i żukira u yażhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	**Â** jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	**A**i bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أعدت لئنشكرتم	ditulis ditulis ditulis	A'antum U'iddat La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur’ân Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السمآء الشمس	ditulis ditulis	As-Samâ’ Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذويالفروض أهلالسنة	Ditulis Ditulis	Żawî al-furûd Ahl as-Sunnah

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Ibu dan Bapak-ku, Mas dan Adik-ku

Guru, Kiai, ulama dan semua yang telah berjasa mewarnai alam pikiranku

Sahabat, saudara, teman seperjuanganku

PMII, untukmu satu tanah airku.. untukmu satu keyakinaknku

Kepada almamater-ku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bangsa dan Negriku Indonesia

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

ألحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين. أمابعد.

Puji syukur kepada Allah swt, Sang Mahahati, Sang Maha segalanya, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Sembah sujud kepada Baginda Muhammad saw, atas segala perjuangan dan amanah yang tak pernah padam sampai akhir zaman.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam studi strata (1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Judul ; *Kuasa Kiai dalam Pemaknaan Politik Partai Kebangkitan Bangsa di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran dan bantuan berbagai pihak. Karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Noorhaidi, S.Ag., M. Phil., Ph. D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak.Dr. H. M. Nur., S., Ag. M., Ag. Selaku ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta sekretaris jurusan dan para staffnya
3. Bapak.Dr. Ahmad Yani Anshori., M.A, pembimbing I dengan segala kesabaran hati dan jiwa, ketekunan, keuletan telah berkenan memberikan bimbingan demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Bapak.Dr. H. M. Nur., S., Ag. M., Ag, pembimbing II yang dengan senang hati telah melakukan koreksi serta meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya, dan dosen-dosen Jurusan Jinayah Siyasah pada khususnya, yang telah mewariskan ilmunya selama penyusun studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu dan Bapakku (Siti Istiqomah & M. Maliki), telapak kaki surgaku yang telah memberikan cinta tak terhingga, kasih sayang yang tak pernah berujung. Terimakasih atas dorongan moral, spiritual, finansial, demi lancarnya pendidikan penyusun. Salam dan *ta'dhimku* selalu ku sematkan untukmu. Untuk kakak dan adik tercinta: Mas Nur & De Ridlo, terimakasih atas segala kasih sayang dan perhatian serta yang sangat berarti.
7. Seluruh Dewan Syura (K.H. Masrur Ahmad MZ, K.H. Muhammad Djawis Masruri, K.H. Abdul Hafidh, K.H. Moh. Yasin) dan Dewan Tanfidziyah

(Achmad Riyanto, S.H.I.) DPW PKB DIY. Terimakasih atas bantuan dan informasi yang penyusun butuhkan selama ini.

8. Sahabat terkasih, KEPOMPONG (Lisa Aminatul Mukaromah, Najichah, Ratih Rohani, Febry Nur Syahidah, Nur Fadilah). Terimakasih telah meluangkan mata, hati dan waktu dan pengertian yang sangat berarti untukku. Kalian mengajariku tentang arti kebersamaan dan persahabatan. Bersama kalian tak terasa penyusun melewati waktu demi waktu di Yogyakarta. Kalian semua sahabat terbaikku.
9. Sahabat PMII Ashram Bangsa, khususnya Korp PETIR angkatan 2008 (Khurul Anam/Ndut, Abdul Aziz M3, Rintoko, Alex Fawzi, Riski Fauzi, Nurul Karimah/ Ema, Uhudiyah, Astri Yulianti, Gugat Prasongko, Anief Rahmawaty, Mahfudz Aly/ Blangkon, Muhammad Fauzi/ Gondez, Maksum, Muhammad Labib, Gufron, Hasyim Asngari/ Kingkong). Terima kasih atas dialektika dan kebersamaan yang selama ini kita rajut bersama. Dari kalian semua penyusun bisa belajar arti sahabat dan indahnya kebersamaan Kalian tak sekedar sahabat tapi saudara yang tak terlahir pada satu rahim.
10. Sepupuku, Roziqotun Nadhifah & *my roommate*, Ida Fitri Sobihah. Terimakasih, bersama kalian penyusun temukan banyak kenangan suka, duka dan keriangan.
11. Kawan sepermainan dan seperjuangan, Jinayah Siyasah angkatan 2008 (Didik Badruddin, Imam Marzuki, dll), Himpunan Mahasiswa Alumni Bahrul Ulum (HIMABU) Sartika Sri Utami, Uciek dll, Pusat Studi dan Konsultasi Hukum

(PSKH), Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F), Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan seluruh penghuni Apartemen 8A.

Akhir kata, penyusun menyadari bahwa hasil penelitian ini tidak memuat kebenaran yang mutlak namun justru sangat terbuka untuk penambahan informasi, data dan fakta atau bahkan revisi sehingga menjadi sempurna. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita, dan bagi studi akademik berikutnya. Amin.

Yogyakarta, 16 Juli 2012

Penyusun

Tsaniyatul Azizah

08370009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAKSI ..... **ii**

NOTA DINAS ..... **iii**

SURAT PERNYATAAN ..... **v**

PENGESAHAN ..... **vi**

TRANSLITERASI ..... **vii**

PERSEMBAHAN ..... **xi**

KATA PENGANTAR ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9
D. Telaah Pustaka 10
E. Kerangka Teoritik 12
F. Metode Penelitian 18
G. Sistematika Pembahasan 21

BAB II KUASA, KEKUASAAN, KEPEMIMPINAN DAN KIAI

A. Kuasa.....22

B. Kekuasaan 26

C. Kepemimpinan 32

D. Kiai 38

BAB III IDEOLOGI PKB

A. PKB Sebagai Partai Politik 46

B. Ideologi PKB.....56

C. Garis Perjuangan PKB 57

BAB IV KUASA KIAI

A. Dalam Kelahiran PKB.....65

B. Dalam Memaknai Ideologi PKB.....68

C. Dalam Perjuangan PKB 71

D. Dalam Dinamika PKB.....74

BAB V

A. Kesimpulan 80

B. Saran-Saran 81

DAFTAR PUSTAKA.....83

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. **TERJEMAH AL-QURAN DAN HADIS**
2. **BIOGRAFI TOKOH**
3. **PEDOMAN WAWACARA**
4. **SURAT BUKTI WAWANCARA**
5. **SUSUNAN PENGURUS DPW PKB YOGYAKARTA**
6. ***MABDA' SIYASI* PKB**
7. **NASKAH DEKLARASI**
8. **LAMBANG PKB DAN MAKNANYA**

9. HASIL PEROLEHAN SUARA PKB DIY
10. SURAT IZIN PENELITIAN
11. CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam praktik politik di hampir seluruh negara modern saat ini, baik yang bercorak demokratis maupun totaliter[1], kehadiran partai politik[2] tidak dapat dielakkan. Di negara-negara demokrasi, partai politik dipakai sebagai sarana untuk mewujudkan hak-hak rakyat dalam menentukan figur yang akan menjadi pemimpinnya. Sedangkan di negara-negara totaliter, partai didirikan oleh elite politik dengan pertimbangan bahwa rakyat perlu dibina agar tercipta stabilitas yang berkelanjutan.

Sebagaimana terjadi di beberapa negara, partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Partai politik dan demokrasi ibarat dua sisi dari satu mata uang. Keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Partai politik merupakan 'oksigen' yang menghidupkan

---

[1] Menggunakan segala-galanya (manusia dan benda) untuk kepentingan negara: negara yang menguasai segenap kehidupan sosial, ekonomi, politik para warga negaranya.

[2] Yang dimaksud partai politik (Parpol) adalah perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seasas, sehaluan dan setujuan(terutama di bidang politik). Baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka (Drs., PK Poerwantana, Partai *Politik Di Indonesia*, Jakarta:1994, hlm. 6). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia,parta politik berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu.

demokrasi. Begitu juga sebaliknya. Partai politik hanya dapat tumbuh dan berkembang dalam alam politik yang demokratis.[3]

Partai politik di Indonesia, terutama setelah tumbangnya era Orde Baru, tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Realitas ini menandakan bahwa nafsu dan *feeling* berpolitik bangsa Indonesia sangat tinggi.[4]

Dalam konstalasi perjalanan politik nasional. Keberadaan gerakan keagamaan juga memiliki andil tidak kecil. Hal ini teramati berbagai aktifitas yang ditampilkannya sebagai upaya menjawab dan mengantisipasi kebutuhan bangsa. Fenomena ini nampak jelas dan mencolok sebab banyaknya problem sosial politik yang menimpa bangsa. Partai yang bernafaskan keagamaan atau memakai atribut keagamaan lebih mudah menarik orang karena dorongan identifikasi dengan partainya.[5]

Salah satu gerakan keagamaan yang ada saat itu adalah Nahdlatul Ulama (selanjutnya dibaca NU). NU dibentuk pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) oleh sejumlah tokoh ulama tradisional dan usahawan Jawa Timur. Organisasi ini dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka K.H. Hasyim Asy'ari merumuskan kitab *Qanun*

---

[3] R. Siti Zuhro, dkk., *DEMOKRASI LOKAL; Perubahan dan Kesinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali* (Yogyakarta: Penerbit Ombak , 2009), hlm. 74.

[4] Yussuf Kalla dkk, *Pergulatan Partai Politik Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 7.

[5] *Ibid*., hlm. 17.

Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab *I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaa'h*. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam khittah NU, yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.[6]

Didirikannya NU (yang artinya adalah Kebangkitan Ulama), tidak hanya didorong untuk mempertahankan paham *ahlussunah waljama'ah* namun juga motif politik untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda.

Basis NU adalah pesantren[7], suatu lembaga pendidikan yang dikelola untuk mengembangkan ajaran *ahlussunnah wal-jama'ah* (aswaja). Secara fisik, pada awalnya, pondok pesantren hanya terdiri dari elemen kiai[8], santri dan bangunan rumah kiai sebagai tempat pengajian Alquran (Sukamto, 1999).[9] Kemudian pola ajarnya tersebut berkembang dalam berbagai pola yang berbeda

---

[6] http://id.wikipedia.org diakses 12 Maret 2012.

[7] Pesantren, secara harfiah berarti"tempat para santri". Pesantren adalah istilah yang umum digunakan untuk menyebut sekolah Islam tradisional. Namun istilah tersebut bervariasi di beberapa daerah. Di Jawa dan Madura sering dipakai istilah *pondok* , di Aceh digunakan *meunasah* , dan di Sumatera Barat digunakan *Surau.*

Kendati umumnya lembaga pesantren di Indonesia dikelola oleh masyarakat NU, namun bukan berarti semua lembaga pesantren merupakan NU, karena ada beberapa pesantren yang dikelola oleh ulama-ulama Islam modernis. Pesantren yang disebut terakhir ini, dari segi metode pendidikannya, sudah mengadopsi metode pendidikan modern yang sekaligus menunjukkan perbedaannya dengan pesantren yang dikelola oleh NU.

[8] Penggunaan kata kiai ditujukan kepada seseorang pemimpin dan pengajar/ guru agama Islam. Hingga tahun 1970-an, hampir dapat dipastikan bahwa seorang kiai adalah juga pemimpin pesantren.

[9] Laode Ida, *NU MUDA; Kaum Progresif dan Sekularisme Baru* (Jakarta: Erlangga,2004), hlm. 1.

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan para kiai dalam upaya mereka mengembangkan pondok pesantren.

Keberadaan pesantren, baik dari segi fisik pemondokan maupun (ajaran) tradisi komunitasnya, menurut Sukamto, memiliki kemiripan dengan subkultural masyarakat Jawa dan Madura. Pondok itu merujuk pada bentuk bangunan masjid, sementara pola kepemimpinan kiai dalam hubungannya dengan santri mengikuti pola kepatuhan, di mana santri menjadi amat patuh pada gurunya.[10] Tradisi kepatuhan tersebut kemudian melahirkan sikap, persepsi dan perilaku politik yang unik. Pada umumnya para jama'ah yang merupakan pengikut setia kiai menjadikan fatwa sebagai referensi utama dalam menyikapi dan mengakomodasi peristiwa dan kegiatan politik

Pertama kali NU terjun pada politik praktis pada saat menyatakan memisahkan diri dengan Masyumi pada tahun 1952 dan kemudian mengikuti pemilu 1955. NU cukup berhasil dengan meraih 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante. Pada masa Demokrasi Terpimpin, NU dikenal sebagai partai yang mendukung Sukarno. Setelah PKI memberontak, NU tampil sebagai salah satu golongan yang aktif menekan PKI, terutama lewat sayap pemudanya GP Ansor.

NU kemudian menggabungkan diri dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tanggal 5 Januari 1973 atas desakan penguasa Orde Baru. Mengikuti pemilu 1977 dan 1982 bersama PPP. Pada muktamar NU di Situbondo, NU

[10] *Ibid*., hlm. 2.

menyatakan diri untuk 'Kembali ke Khittah 1926' yaitu untuk tidak berpolitik praktis lagi.

Bagi sebagian kalangan NU- terutama dalam menyikapi amanah Khittah 1926- pemurnian NU sebagai gerakan keagamaan memang tidak mutlak harus dilakukan dengan mengambil jarak yang seluas-luasnya dengan kekuasaan. Kekuasaan, konon memang harus diakrabi sedemikian rupa sehingga pelaksanaan kekuasaan tersebut tidak membawa *madlarat.* Dan NU adalah salah satu *moral-supportnya*. Kendati demikian, secara institusional, NU memang tidak boleh terlibat jauh dalam praktik-praktik politik praktis (Misrawi,2004).[11]

Eurofia era reformasi yang ditandai dengan peralihan tahta kekuasaan dari Soeharto ke BJ Habibie memberikan angin segar bagi dunia perpolitikan Indonesia, khusunya kepartaian. Begitu banyak partai yang muncul pada saat itu, Para pengamat menilai fenomena ini adalah buah dari adanya akumulasi berbagai persoalan ideologi politik bangsa yang hampir tigapuluh tahun lebih diberlakukan secara diskriminatif dalam pembentukan *platform* bangsa ini.[12]

NU sendiri rupanya tidak mau ketinggalan. Setelah hampir tiga dasawarsa NU juga ikut tergerus marjinalisasi politik penguasa, ormas ini setidak-tidaknya digugah warga *jam'iyyah* untuk berpartisipasi di kancah perpolitikan nasional

---

[11]Imam Nahrawi, *MORALITAS POLITIK PKB; Aktualisasi PKB sebagai Partai Kerja, Partai Nasional dan Partai Modern* (Malang: Averroes Press, 2005), hlm. 14.

[12] *Ibid.*, hlm. 15.

melalui pendirian partai. [13]Hal ini tersirat dari banjirnya surat yang masuk ke Pengurus Besar NU (Selanjutnya dibaca PBNU) yang dikirim kaum *Nahdliyyin*, sehari setelah mundurnya Soeharto. Hampir semua usulan bernada sama, yakni menginginkan agar secepat mungkin PBNU membantu mewujudkan adanya satu wadah untuk menyalurkan aspirasi politik warga NU.

Keinginan itu direspon oleh PBNU yang kemudian membidani lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (selanjutnya dibaca PKB). PKB dideklarasikan pada 23 Juli 1998 oleh tokoh-tokoh terkemuka NU dan ditasbihkan sebagai satu-satunya wadah berpolitik bagi anggota organisasi sosial keagamaan tersebut. Berpijak pada AD/ART dan *Mabda Siyasi*, basis ideologi PKB adalah Pancasila dan memiliki sifat sebagai partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras dan lintas golongan yang dimanifestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan.

Sebagai partai yang lahir dari rahim NU, baik secara struktural maupun kultural, PKB mewarisi NU. Secara struktural, dalam organisasinya PKB memiliki dua institusi, yakni Dewan Syuro sebagai institusi penentu kebijakan umum dan Dewan Tanfidz sebagai pelaksana kebijakan partai. Hal ini persis sebagaimana yang ada di NU, yakni Lembaga Syuriyah dan Tanfidziyah.[14]

---

[13] *Ibid.*, hlm. 15.

[14] Khoirudin, *Menuju* Partai *Advokasi* (Yogyakarta:Pustaka Tokoh Bangsa, 2005), hlm. 9.

Tujuan politik PKB adalah keadilan (*justice).* Jika negara yang dibangun berlandaskan keadilan, dapat diandaikan bahwa semua warga akan bekerja dan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.[15] Tentu panjang jalan dilalui PKB untuk sampai pada misi dan tujuan politiknya. Dalam kerangka perjuangan panjang itu pula, PKB menunjukkan keeksistensiannya dengan tampilnya KH. Abdurrahman Wahid, salah satu kader terbaik PKB sebagai Presiden Indonesia.

Kekuatan yang berpengaruh atas kemenangan partai yang ikut berkompetisi di setiap pemilu khususnya di PKB adalah kiai. Sosok kiai menjadi incaran para politisi untuk dimintai restunya, atau bahkan melibatkannya dalam kepengurusan partai. Tim sukses yang telah dibentuk para *header* partai menunjukkan bahwa peran para kiai yang signifikan akan dapat meraup suara. Dalam menentukan calon presiden-calon wakil presiden atau calon legislatif-calon wakil legislatif sekalipun, tidak akan terlepas dari keikut-sertaan para kiai yang punya basis massa yang riil. Bagaimanapun relasi kiai dan dunia politik atau dengan para politisi dalam kehidupan politik di Indonesia tetap menjadi hal yang menarik. Terutama PKB, yang aktifisnya terdiri dari kiai.

Selain itu, PKB sebagai partai yang didirikan para ulama NU ternyata menyimpan potensi konflik yang luar biasa dahsyat. Konflik dan perpecahan demi perpecahan organisasi itu merupakan fakta tak terbantahkan. Sampai saat

---

[15] H. Matori Abdul Djalil, *Dari NU untuk Kebangkitan Bangsa* (Jakarta: Grasindo, 1999) hlm. ix.

ini, ada tiga episode konflik. Pertama, Mathori Abdul Djalil. Kedua, Alwi Shihab dan ketiga, Muhaimin Iskandar.

Dalam setiap episode konflik berimbas pada keberadaan kiai, baik yang ada dalam struktur PKB maupun yang berada di luar struktur partai. Sejalan dengan kultur NU, kiai menduduki posisi dan peran yang sangat penting. Kiai telah dianggap sebagai pemegang otoritas moral, pembawa "pesan langit" dan label surgawi lainnya. Dalam struktur PKB, kiai ditempatkan dalam posisi Dewan Syuro, lembaga perumus kebijakan tertinggi partai sekaligus pemegang otoritas moral untuk mengawasi pergerakan politik dalam upaya menggapai cita-cita politik PKB. Konflik itu juga menumbuhkan citra yang kontradiksi terhadap keberadaan kiai. Antara citra pemersatu, *problem solver*, tokoh panutan dan label mulia lainnya yang melekat pada kiai dengan realitas politik di PKB yang justru penuh sesak dengan konflik.

Munculnya PKB hingga menjadi seperti sekarang tentu saja tidak bisa dilepaskan dari peran besar para kiai dalam proses kelahirannya. Kiai adalah figur dalam tradisi NU yang selalu dimintai saran sekaligus pendapat dalam setiap pengambilan keputusan di organisasi ini.[16]

Dalam kondisi seperti ini kita bisa menelaah, bahwa sosok kiai yang awalnya hanya dalam lingkup pesantren desa yang mentransformasikan nilai-nilai agama pada masyarakat lokal, ternyata telah ditempatkan pada posisi yang lebih

[16] Imam Nahrawi, *MORALITAS POLITIK PKB; Aktualisasi PKB sebagai Partai Kerja, Partai Nasional dan Partai Modern* (Malang: Averroes Press, 2005), hlm. 21.

strategis. Karena para kiai dianggap dapat mengubah *mind-set* masyarakat yang lebih luas dalam berbagai bidang, termasuk politik di Indonesia.

Dalam konteks inilah, menarik untuk mencermati dan menelaah kuasa kiai dalam pemaknaan politikdari partai yang mempunyai basis massa orang Islam, khususnya Partai Kebangkitan Bangsa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun dapat memberikan rumusan masalah : Bagaimana kuasa kiai terhadap pemaknaan politik PKB di DIY ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kekuasaan kiai dalam pemaknaan politik PKB.

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis: Merupakan sumbangan pemikiran bagi pihak akademik serta menambah khasanah keilmuan untuk melakukan penelitian di masa yang akan datang.
2. Secara Praktis: Merupakan sumbangan pemikiran dengan harapan dapat membantu memberikan solusi tentang permasalahan yang sedang terjadi

D. Telaah Pustaka

Berangkat dari asumsi di atas, maka penyusun akan memfokuskan diri melakukan telaah pustaka terhadap buku atau karya ilmiah yang membahas mengenai NU, kiai atau PKB.

Di antara karya tulis yang ada dan dijadikan rujukan adalah:

Pertama, Analisis Kebijakan Politik Partai Kebangkitan Bangsa (Studi Atas Konsep Advokasi) [17]oleh Hesbul Bahar Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Jinayah Siyasah. Pokok bahasan skripsi ini adalah tentang bagaimana konsep advokasi dalam PKB serta implementasinya ke dalam produk perundang-undangan dan kebijakan publik lainnya.

Kedua, Peran Politisi Kiai NU di Tengah Krisis Multi Dimensional(Study Kristis Terhadap Peran Abdurrahman Wahid Sebagai Presiden RI dan Kiai NU dalam Konsistensi Pribumisasi Nilai-Nilai Keislaman)[18] yang ditulis oleh Khoirul Anam, mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah. Skripsi ini menganalisis peran kiai NU yang terjun ke dalam ranah politik praktis dan mengkritisi para kiai yang menarik dan memprovokasi massa dengan dalil agama.

---

[17] Hesbul Bahar, *Analisis Kebijakan Politik Partai Kebangkitan Bangsa(Studi Atas Konsep Advokasi).* Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta:Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

[18] Khoirul Anam, *Peran Politisi Kiai NU di Tengah Krisis Multi Dimensional(Study Kristis Terhadap Peran Abdurrahman Wahid Sebagai Presiden RI dan Kiai NU dalam Konsistensi Pribumisasi Nilai-Nilai Keislaman).* Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta:Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Ketiga, Hubungan NU dengan Partai Kebangkitan Bangsa dalam Perspektif Siyasah, skrispi M. Amin Mubarak Tahun 2006 yang menguraikan mengenai bentuk hubungan dan realisasi hubungan NU dengan PKB.

Keempat, AVONTURISME NU; Menjejaki Akar Konflik Kepentingan Politik Kaum Nahdliyyin. Oleh Dr Ali Anwar,. M. Si yang diterbitkan tahun 2004. Dalam buku ini dijelaskan tentang bagaimana NU di kancah politik praktis dan pemikiran para elite politik di lingkungan NU. Juga interaksi dinamis yang berkaitan erat dengan terjadinya sikap dan perilaku politik para elite politik di lingkungan NU.

Kelima, Kiai dan Politik; Membaca Citra Politik Kiai oleh Prof. Dr. H. Imam Suparyogo yang diterbitkan tahun 2009. Buku ini memberikan perspektif yang agak berbeda tentang bagaimana melihat sosok kiai dalam mengemban peran-peran sosialnya. Di samping itu, dalam buku ini juga menelusuri jejak-jejak keterlibatan kiai di politik. Keterlibatan kiai dalam politik harus dilihat dalam perspektif relasi antara Islam dan politik sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Terlepas dari perdebatan konseptual interpretasi terhadap relasi Islam dan politik, sesuatu yang niscaya adalah bahwa seharusnya kiai tetap mengemban misi *amar ma'ruf nahi munkar*.

Keenam, Moralitas Politik PKB (Aktualisasi PKB sebagai Partai Kerja, Partai Nasional dan Partai Modern). Karya Imam Nahrawi ini berbicara mengenai moralitas politik yang berkembang di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa yang *notabene* di *back-up* oleh para kiai pesantren NU. Bagaimana kultur pesantren

NU yang tradisional mampu mewarnai perjalanAN politik PKB- mulai dari awal berdirinya PKB hingga mengagendakan pewarisan estafet kepemimpinan sampai penentuan visi dan program kerja ke depan.

Dari pemaparan telaah pustaka yang penyusun uraikan di atas belum ada satu buku maupun literatur yang mengkaji secara spesifik tentang permasalahan kuasa kiai dalam pemaknaan PKB, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebanyakan hanya membahas mengenai kiai yang terjun dalam politik praktis. Oleh sebab itu, peneliti merasa bahwa permasalahan yang penyusun ajukan membutuhkan pembahasan dan penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah.

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep *Siyasah Dusturiyah*

Prinsip dasar Islam tentang pengaturan kehidupan publik bermasyarakat dan bernegara adalah mewujudkan kemaslahatan umat atau kesejahteraan rakyat secara umum. Dan untuk mewujudkan kemaslahatan pada level praktek politik, dalam diskursus fikih dikenal dengan terminologi *siyasah syar'iyyah.*[19]

[19] *Siyasah Syar'iyyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia berdasakan syara'.

Salah satu cabang dari *siyasah syar'iyyah* adalah *siyasah dusturiyah*.[20] Permasalahan dalam *Siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak yang lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi dari kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan komplek. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan);
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya;
3. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya;
4. Persoalan *ba'iat*;
5. Persoalan w*aliyul ahdi*;
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*;
8. Persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya.

[20] Permasalahan dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya.

2. Teori Kekuasaan

PKB dilahirkan oleh NU, secara otomatis PKB mempunyai hubungan erat dengan NU. Dan basis sosial dari NU adalah pesantren. Maka dari itu, PKB juga tidak dapat terpisahkan dengan pesantren.

Pesantren sebagai basis sosial dan NU mempunyai seorang tokoh sentral, yakni kiai. Perannya bersisi banyak. Ia adalah cendekiawan, guru, sekaligus pembimbing spiritual. Seringkali ia bertindak sebagai penjaga iman, penghibur sekaligus pendekar. Menurut teori, otoritas kiai diperoleh terutama dari pengetahuan agamanya.[21]

Otoritas tradisional para kiai juga dapat menjadi sumber legitimasi dan eksistensi lembaga pesantrennya. Kehadiran mereka dapat diterima oleh siapapun tanpa memberikan suatu kritik apa pun terhadap ajaran, tindakan, dan perilaku kiai yang bersangkutan.[22]

Posisi para kiai seperti itu dianggap memiliki kewibawaan tersendiri dan pada akhirnya menimbulkan suatu sosok kharismatik yang tidak dimilki oleh tokoh-tokoh informal lainnya. Keberadaan kiai seperti itu menjadikan santri (termasuk masyarakat sekitarnya) sebagai klien yang harus tunduk pada kiai.

---

[21] Greag Fealy, *IJTIHAD POLITIK ULAMA; Sejarah NU 1952-19679* (Yogyakarta:LKiS, 2007), hlm. 23.

[22] Laode Ida, *NU MUDA; Kaum* Progresif *dan Sekularisme Baru* (Jakarta:Erlangga, 2004), hlm. 3.

Berdasarkan perspektif Weberian, menarik sekali untuk mengamati perilaku elite politik NU dalam mengoperasikan kekuasaannya, perspektif Weberian ini dianut oleh Dahl(1957), Anderson(1990), Lipset(1969), atau Easton(1965). Dalam hal ini mereka membedakan penegertian kekuasaan dalam kata *power* dan *force.*[23]

> *Force* adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara paksa atau menggunakna kekerasan. *Force* lebih berkonotasi pada kekuatan fisik, bukan kekuasaan politik. *Power* adalah kekuasaan politik yang bisa saja secara fisik, namun dibatasi oleh aturan-aturan tertentu. Jadi, kekuasaan merupakan initi atau esensi dari politik. Bahkan, definisi politik itu sendiri adalah sebuah format, karakteristik, dan sumber aturan atau batasan dimana para pelaku politik menggunakan kekuasaannya di masyarakat(Weber, 1978:53).

Mengacu pada definisi kekuasaan menurut Weber tersebut, kekuasaan dipandang sebagai kemampuan melaksanakan kemauan sendiri yang diperoleh melalui hubungan sosial. Jadi kekuasaan adalah wujud nyata kemampuan seseorang untuk memaksa untuk orang lain yang resisten guna mematuhi perintahnya. Kerelaan atau kepatuhan menjalankan permintaan orang lain itu bisa saja terjadi karena berbagai dorongan, misalnya merasa sebagai kewajiban, rasa takut, kebodohan, keuntungan pribadi, kesamaan nilai, emosi atau motif ideal sebuah rasa solidaritas. Konsep kekuasaan dalam

---

[23] Dr. Ali Anwar, M. Si, *AVONTURISME NU; Menjejaki Akar Konflik Kepentingan-Politik Kaum Nahdliyyin* (Bandung:Humaniora, 2004), hlm. 29.

perpektif Weber ini dapat membantu memahami alasan elite penguasa dalam upaya mencari kekuatan.[24]

Kekuasaan dilakukan melalui adanya pola hubungan yang memegang peran subyek atau sebagai yang menguasai dengan memerintah dan ada yang berposisi sebagai obyek kekuasaan atau mereka yang diperintah atau dengan bahasa lain dikatakan sebagai pola hubungan *the ruler and the ruled.*[25]

Kekuasaan pada dasarnya selain memilki karakteristik hirerarkhis juga memiliki karakteristik piramida. Para elite akan selalu lebih sedikit dari massa secara kuantitas tetapi memiliki kapabilitas yang kuat dan solid secara kualitas sehingga mereka dapat melakukan perintah dengan daya pengaruh yang efektif terhadap massanya.[26]

Kekuasaan dapat dilihat dari sumber yang melekat padanya. Sumber kekuasaan lain adalah kedudukan seseorang secara formal maupun informal.

3. Kiai sebagai pewaris Nabi

إنّما يخشى الله من عباده العلمؤا[27]

---

[24] *Ibid.* hlm 30.

[25] Deden Faturrohman dan Wawan Sobari, *Ilmu Politik* (Malang:Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hlm. 23.

[26] *Ibid.*, hlm. 23.

[27] Al-Fâthir (35); 28.

Ayat ini menjelaskan bahwa ulama/ kiai itu adalah manusia yang sangat patuh kepada Allah, Agama, Kitab dan Sunnah Rasul-Nya. Dan kepatuhan mereka itu sangat sempurna kepada Allah swt.

Makna ayat tersebut bukan berarti bahwa selain mereka (para ulama) tidak memiliki rasa patuh kepada Allah. Setiap muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah juga memiliki rasa patuh kepada Allah. Namun, kepatuhan mereka kepada Allah berbeda. Bagi orang-orang yang lebih mengenal dan mengetahui tentang Allah, mereka lebih patuh kepada Allah. Dan bagi orang-orang yang sedikit ilmu dan sedikit pengetahuan maka sedikitlah rasa takut mereka terhadap Allah dan sedikit pula kepatuhan mereka kepadaNya.

Di samping sebagai perantara antara diri-Nya dengan hamba-hamba-Nya, Allah swt juga menjadikan para ulama/kiai sebagai pewaris perbendaharaan ilmu agama. Sehingga ilmu syariat terus terpelihara kemurnian sebagaimana awalnya. Oleh karena itu kematian salah seorang dari mereka mengakibatkan terbuka fitnah besar bagi muslimin. Rasulullah saw juga bersabda:

"[28]إن العلما ء ورثة الأنبياءِ

[28] HR At-Tirmidzi dari Abu Ad-Darda radhiallahu ‘anhu.

F. Metode Penelitian

Untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai obyek yang dikaji, karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk dapat menghasilkan hasil yang memuaskan, di samping itu metode merupakan cara bertindak supaya peneliti berjalan terarah dan mencapai hasil yang maksimal.[29]

Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai the *ways testing the hypotheses* dimana di dalamnya terdapat fakta-fakta atau data yang menjadi landasan dari setiap pemecahan masalah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan *(Field research)* yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu. Dalam hal ini penyusun mengambil obyek penelitian tentang Kuasa Kiai dalam Pemaknaan politik PKB di DIY.

2. Sifat Penelitian

   Adapun metode yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif yang bersifat kualitatif, yakni prosedur penelitian yang

[29] Anton Bakker, *Metode Filsafat* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986), hlm 10.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang (subyek penelitian) atau masyarakat.[30]

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam memaparkan data-data dalam skripsi ini adalah metode pendekatan historis- sosiologis. Pendekatan historis ini melihat latar belakang sejarah bagaimana berdirinya PKB yang kemudian digabungkan dengan pendekatan soisologis. Pendekatan sosiologis adalah sebuah pendekatan dimana peneliti menggunakan logika-logika dan teori-teori sosiologi baik teori klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena sosial politik yang ada.[31]

4. Pengumpulan Data

Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh dengan metode wawancara */interview* dan kuesioner yang diisi oleh responden. Wawancara adalah pertemuan periset dan responden.[32] Dengan kata lain, metode *interview*

---

[30]Lexy J. Moleiong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998), hlm. 3.

[31] http://www.surgamakalah.com/2011/12/pendekatan-sosiologis-dalam-metodologi.html. Diakses 12 Maret 2012.

[32]Lisa Harisson, *Metodologi Penelitian Politik* (Jakarta:Kencana Perdana Media Group, 2007), hlm. 104.

atau wawancara adalah suatu metode untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung secara sistematik dan berlandaskan pada tujuan penelitian.[33] Metode yang dipakai dalam wawancara ini adalah secara langsung dan terbuka. Metode secara langsung dipakai pada saat studi pendahuluan dan cara terbuka dipakai untuk mendapatkan informasi dari responden secara langsung.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada kiai-kiai yang terlibat langsung dalam PKB, mereka adala Dewan Syura PKB.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dipeoleh dari studi pustaka yang bersumber dari karya ilmiah, jurnal,data partai, ensiklopedi, artikel, ataupun media online.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca, setelah data dianalisa dan diformulasikan lebih sederhana, maka hasilnya akan diinterpretasikan untuk mencari makna dan implikasi yang lebih luas dari hasil-hasil penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini hanya bertujuan deskriptif semata-mata. Dalam pelaksanaanya peneliti akan menggunakan teori yang telah ada, kemudian peneliti akan menafsirkan data itu dengan jalan menemukan

[33] Sutrisno Hadi, *Metodologi Rsearch II* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1979), hlm. 156.

kategori-kategori dalam data yang berkaitan dengan teori yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta menghasilkan sebuah karya tulis yang sistematis, maka dalam penelitian skripsi ini peneliti menyusun dengan sistematika pembahasan seperti berikut:

Paparan laporan penelitian ini diawali dengan Bab I yaitu pendahuluan, yang memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pembahasan dalam bab ini menjadi acuan dan kerangka penelitian.

Adapun isi penelitian ini dipaparkan dalam bab selanjutnya yaitu Bab II, yang mendeskripsikan dan korelasi mengenai kuasa, kekuasaan, kepemimpinan dan kiai.

Bab selanjutnya adalah Bab III tentang PKB di DIY, Ideologi PKB, Dan Perjuangan PKB.

Pembahasan Bab IV yaitu tentang kuasa kiai dalam PKB, Ideologi PKB, Perjuangan PKB dan dinamika PKB.

Bab V berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang ditulis secara lebih ringkas. Sehingga, dapat dikatakan dalam kesimpulan ini akan dipaparkan hasil penelitian. Sedangkan saran merupakan rekomendasi dari peneliti terkait hasil penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Keberadaan seorang kiai pada komunitasnya adalah lebih banyak mengisi ruang-ruang kosong sebagai implementasi pola-pola kepemimpinan yang paternalistik, di mana hubungan antara pemimpin dan masyarakatnya menganut pola *patron* klien. Dengan pola hubungan yang demikian maka kiai akan menjadi figur sentral, panutan, tokoh yang berpengaruh di komunitasnya. Peranan strategis kiai dalam politik, kiai mempunyai banyak keuntungan sosial atas masyarakatnya. Kiai mampu mempengaruhi, memobilisasi, mengarahkan dengan baik terhadap masyarakatnya. Di sisi lain, masyarakat sebagai klien maka kepatuhan pada pemimpinnya, kiainya nyaris tak bersyarat.

Berdasarkan pemaparan pada sebelumnya, maka akan didapat dua hal, yaitu:

1. Bahwa di DIY, kiai tetap memiliki kuasa dalam PKB. Ini dikarenakan kultur PKB DIY masih sama dengan NU pada umumnya yang sangat patuh dan taat kepada kiai. Kalaupun ada pergeseran maka belum begitu signifikan. Namun, tidak semua kiai memiliki kekuasaan untuk memutuskan/ memberi kebijakan partai.
2. Kekuasaan kiai dalam PKB di DIY ini simetris (seimbang) tidak terlihat adanya superordinasi dan subordinasi. Sehingga kekuasaan kiai di PKB ini

tidak mutlak. Setiap kebjakan selalu ada kordinasi yang baik antara Dewan Tahfidz dan Dewan Syura.

3. Peran kiai dalam PKB DIY ada tiga bentuk. Sebagai aktor, pendukung dan sebagai partisipan.
    a) Sebagai aktor, kiai langsung terjun ke dalam garis perjuangan PKB, misalnya dalam kelahiran PKB DIY.
    b) Selanjutnya sebagai pendukung maksudnya pada peran ini, kiai mendukung terhadap PKB, namun tidak berada di garis depan dalam memperjuangkan PKB DIY.
    c) Selanjutnya yakni sebagai partisipan, adalah kiai memberikan restu terhadap calon tertentu, dan tidak terlibat dalam aksi dukungan, atau menjadi tim sukses. Jadi tidak semua kiai fokus pada PKB DIY, kebanyakan dari mereka memilih fokus pada pesantren-pesantren yang diasuhnya.

B. Saran

Tahapan akhir dari setiap kerja dan karya adalah evaluasi, yang dengannya setiap langkah yang ditempuh kemudian lebih dapat disempurnakan dan diukur lagi. Di samping tujuan tersebut, hasil yang dicapai tentu dapat dijadikan sebagai dari poses refleksi setiap pihak yang kaan melakukan hal serupa.

Saran- dan evaluasi yang penyusun usulkan adalah:

1. PKB hendaknya tidak melupakan begitu saja peran-peran kiai yang merintis, memelihara dan membesarkan PKB.
2. Adanya maksimalisasi Dewan Syura dalam PKB DIY. Pengambilan keputusan sebaiknya bukan secara personaliti, tetapi kelembagaan.
3. Adanya penelitian lanjut mendalam tentang PKB di Bantul dan Kulonprogo. Karena, dilihat dari sisi religiuitas, Islam di Kulonprogo lebih kental. Akan tetapi jumlah suara PKB terbesar ada di Bantul.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Al-Quran dan Terjemahannya, Surabaya:Al-Hidayah, 2002

H.R Muslim

B. Kelompok Fiqih/Ushul Fiqih

Abdul Djalil, Mathori, H, *Dari NU untuk Kebangkitan Bangsa*, Jakarta: Grasindo, 1999.

Al-Mawardi, Abu Hasan *Al-Ahkan Asulthaniyah wa Wilayatuh al-Diniyyah, Musthofa al-Asabil Halabi*, Mesir, Cetakan II

Anam, Khoirul, *Peran Politisi Kiai NU di Tengah Krisis Multi Dimensional(Study Kristis Terhadap Peran Abdurrahman Wahid Sebagai Presiden RI dan Kiai NU dalam Konsistensi Pribumisasi Nilai-Nilai Keislaman).* Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta:Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Anwar, Ali, Dr. *AVONTURISME NU: Menjejaki Akar konflik-Kepentingan Politik Kaum Nahdliyyin* , Bandung: Humaniora, 2004.

Bahar, Hesbul, *Analisis Kebijakan Politik Partai Kebangkitan Bangsa(Studi Atas Konsep Advokasi).* Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta:Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Daman, Rozikin, *Membidik NU: Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, Gama Media: Yogyakarta, 2001

Dhafir, Zamakhsari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES, 1982.

Djazuli Prof. H.A., *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta:Kencana, 2007.

Faridh, Miftah , *Peran Sosial Politik Kyai di Indonesia*, dalam jurnal Sosioteknologi, Edisi 11 tahun 2007

Fealy, Greag, *IJTIHAD POLITIK ULAMA; Sejarah NU 1952-19679*, Yogyakarta:LKiS, 2007.

Ghufroni, M, *TAKZIRAN DAN RELASI KUASA DI PONDOK PESANTREN (Studi tentang Fenomena Kekerasan di Pondok Pesantren Majlissut Ta'allum Kota Semarang) Tesis tidak diterbitkan*. Universitas Negeri Semarang, 2011.Ida, Laode, *NU MUDA; Kaum* Progresif *dan Sekularisme Baru*, Jakarta: Erlangga, 2004.

Kalla, Yusuf dkk, *Pergulatan Partai Politik Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Khairussalim dkk, *Tujuh Mesin Pendulang Suara*, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Khan, Qamaruddin, *The Political Thought of Ibnu Taimiyyah*, terjemahan Anas Mahyuddin, "*Pemikiran Politik Ibnu Taimiyyah*", Bandung: Pustaka, 1983.

Koirudin, Menuju *Partai Advokasi*,, Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2005.

Nahrawi, Imam, *Moralitas Politik PKB: Aktualisasi PKB sebagai Partai Kerja, Partai Nasional dan* Partai *ModerN*, Malang: Averroes Press, 2005.

Ulum, Bahrul , *Bodohnya NU apa NU dibodohi?*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 1999.

Patoni, Ahmad, Dr. H, *Peran Kiai* Pesantren *dalam Partai Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Piliang, Yasraf , A., *TRANSPOLITIKA; Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas*, Bandung: Jalasutra Cet III 2005.

Rahardjo, Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002.

Rozaki, Abdur, *Menabur Karisma Menuai Kuasa*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004.

Zuhro, Siti, R, dkk., *DEMOKRASI LOKAL; Perubahan dan Kesinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*, Yogyakarta: Penerbit Ombak , 2009.

C. Lain-lain

Bakker, Anton, *Metode Filsafat*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986.

Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Eriyanto, 2001, *Analisis Wacana: Pengantara Analisis Teks Media*, Yogyakarta*: L*KIS Jogjakarta, 2001.

Faturrahman, Deden dan Sobari, Wawan, *Ilmu Politik*, Malang:Universitas Muhammadiyah Malang,2004.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1979.

Harissa, Lison, *Metodologi Penelitian Politik*,, Jakarta:Kencana Perdana Media Group, 2007.

Koentjaraningrat, Prof. Dr, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Dian Rakyat, 1967.

Maliki, Zainuddin, *Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada *University* Press, 2010.

Moleiong, Lexy, J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998.

Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola,1994.

Roderick, Martin, *Sosiologi Kekuasaan*, (Rajawali, 1990), hlm. 71 dikutip dari buku *The Theory of Social and Economic Organization*, diterjemahlan oleh A. M Henderson dan T. Parsons(Chicago: Fress Press),

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi* Suatu *Pengantar*, Jakarta:Rajawali, cet 7 1986

WJS Purwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,

http://www.surgamakalah.com/2011/12/pendekatan-sosiologis-dalam metodologi.htm.

http://id.wikipedia.org.

http://www.scribd.com/doc/57512590/Teori-Kuasa-Dan-Status

http://filsafat.kompasiana.com/2011/04/17/kuasa-dan-wacana/

Lampiran I

TERJEMAH AYAT-AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS

No	Halaman	Footnote	Terjemah
1	16	27	Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya hanyalah para ulama.
2	17	28	Sesungguhnya para ulama' adalah pewaris para nabi.
3	30	44	Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kemu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an0 dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
4	34	48	Imamah adalah suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.
5	35	50	Wajib kepada setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya baik dia senang ataupun tidak senang selama pemimpin itu tidak menyuruh melakukan maksiat. Apabila ia memerintahkan untuk melakukan maksiat, maka tidak perlu mendengarkan dan mentaatinya.
6	60	80	Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu(melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat(tebusan) kepadanya dengan baik(pula). Yang emikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertaqwa.

Lampiran 2

BIOGRAFI TOKOH

- **ABDURRAHMAN WAHID**

Kyai Haji Abdurrahman Wahid, akrab dipanggil Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 dari pasangan Wahid Hasyim dan Solichah. Guru bangsa, reformis, cendekiawan, pemikir, dan pemimpin politik ini menggantikan BJ Habibie sebagai Presiden RI setelah dipilih MPR hasil Pemilu 1999. Dia menjabat Presiden RI dari 20 Oktober 1999 hingga Sidang Istimewa MPR 2001. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Addakhil atau "Sang Penakluk", dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. "Gus" adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada anak kiai.

Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara, dari keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya, KH. Hasyim Asyari, adalah pendiri Nahdlatul Ulama (NU), sementara kakek dari pihak ibu, KH Bisri Syansuri, adalah pengajar pesantren.

Ayah Gus Dur, KH Wahid Hasyim, terlibat dalam Gerakan Nasionalis dan menjadi Menteri Agama pada 1949. Ibunya, Hj. Sholehah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang.

Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda.

Akhir 1949, dia pindah ke Jakarta setelah ayahnya ditunjuk sebagai Menteri Agama. Dia belajar di Jakarta, masuk ke SD KRIS sebelum pindah ke SD Matraman Perwari.

Gus Dur juga diajarkan membaca buku non Islam, majalah, dan koran oleh ayahnya untuk memperluas pengetahuannya. Pada April 1953, ayahnya meninggal dunia akibat kecelakaan mobil.

Pendidikannya berlanjut pada 1954 di Sekolah Menengah Pertama dan tidak naik kelas, tetapi bukan karena persoalan intelektual. Ibunya lalu mengirimnya ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikan.

Pada 1957, setelah lulus SMP, dia pindah ke Magelang untuk belajar di Pesantren Tegalrejo. Ia mengembangkan reputasi sebagai murid berbakat, menyelesaikan pendidikan pesantren dalam waktu dua tahun (seharusnya empat tahun).

Pada 1959, Gus Dur pindah ke Pesantren Tambakberas di Jombang dan mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai guru dan kepala madrasah. Gus Dur juga menjadi wartawan Horizon dan Majalah Budaya Jaya.

Pada 1963, Wahid menerima beasiswa dari Departemen Agama untuk belajar di Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir, namun tidak menyelesaikannya karena kekritisan pikirannya.

Gus Dur lalu belajar di Universitas Baghdad. Meskipun awalnya lalai, Gus Dur bisa menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970.

Dia pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya, guna belajar di Universitas Leiden, tetapi kecewa karena pendidikannya di Baghdad kurang diakui di sini. Gus Dur lalu pergi ke Jerman dan Prancis sebelum kembali ke Indonesia pada 1971.

Gus Dur kembali ke Jakarta dan bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), organisasi yg terdiri dari kaum intelektual muslim progresif dan sosial demokrat.

LP3ES mendirikan majalah Prisma di mana Gus Dur menjadi salah satu kontributor utamanya dan sering berkeliling pesantren dan madrasah di seluruh Jawa.

Saat inilah dia memprihatinkan kondisi pesantren karena nilai-nilai tradisional pesantren semakin luntur akibat perubahan dan kemiskinan pesantren yang ia lihat.

Dia kemudian batal belajar luar negeri dan lebih memilih mengembangkan pesantren.

Abdurrahman Wahid meneruskan karirnya sebagai jurnalis, menulis untuk Tempo dan Kompas. Artikelnya diterima baik dan mulai mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial.

Dengan popularitas itu, ia mendapatkan banyak undangan untuk memberikan kuliah dan seminar, sehingga dia harus pulang-pergi Jakarta dan Jombang.

Pada 1974, Gus Dur mendapat pekerjaan tambahan di Jombang sebagai guru di Pesantren Tambakberas. Satu tahun kemudian, Gus Dur menambah pekerjaannya dengan menjadi Guru Kitab Al Hikam.

Pada 1977, dia bergabung di Universitas Hasyim Asyari sebagai dekan Fakultas Praktik dan Kepercayaan Islam, dengan mengajar subyek tambahan seperti pedagogi, syariat Islam dan misiologi.

Ia lalu diminta berperan aktif menjalankan NU dan ditolaknya. Namun, Gus Dur akhirnya menerima setelah kakeknya, Bisri Syansuri, membujuknya. Karena mengambil pekerjaan ini, Gus Dur juga memilih pindah dari Jombang ke Jakarta.

Abdurrahman Wahid mendapat pengalaman politik pertamanya pada pemilihan umum legislatif 1982, saat berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), gabungan empat partai Islam termasuk NU.

- **AL-MAWARDI**

Dialah imam besar, ahli fiqh, ahli ushul fiqh, dan pakar tafsir Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. Ia dilahirkan di Basrah pada 364 H/974 M, dalam satu keluarga Arab yang membuat dan memeperdagangkan air mawar, dan karena itu mendapat nama julukan “Al Mawardi.”

Ia dididik di pertama di Basrah , setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia belajar Fiqh (yurisprudensi Islam) dari ahli hukum Abu al-Wahid al -Simari. Dia kemudian pergi ke Baghdad untuk studi lanjutan di bawah Syeikh Abd al-Hamid dan Abdallah al-Baqi. kemahiran-Nya dalam yurisprudensi Etika, ilmu politik dan sastra terbukti bermanfaat dalam mengamankan karir terhormat baginya. Setelah pengangkatan pertama sebagai Qadhi (Hakim), dia secara bertahap dipromosikan ke kantor yang lebih tinggi, sampai ia menjadi Ketua Mahkamah Agung di Baghdad. Abbasiyah Khalifah al-Qaim bi Amr Allah mengangkatnya sebagai duta nya keliling dan mengirimnya ke sejumlah negara sebagai kepala misi khusus. Dalam kapasitas ini ia memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara kekhalifahan Abbasiyah menurun dan kekuatan meningkatnya Buwahids dan Seljukes. Dia disukai dengan hadiah yang kaya dan upeti oleh Sultan sebagian besar waktu. Dia masih di Baghdad ketika itu diambil alih oleh Buwahids. Al-Mawardi meninggal pada 1058 C.E.

Al-Mawardi adalah seorang ahli hukum besar, mohaddith, sosiolog dan ahli di bidang Ilmu Politik. Dia adalah seorang ahli hukum di sekolah Fiqh dan bukunya Al-Hawi pada prinsip-prinsip yurisprudensi yang diselenggarakan di bereputasi tinggi.

Kontribusinya dalam ilmu politik dan sosiologi terdiri dari sejumlah buku monumental, yang paling terkenal di antaranya adalah Kitab al-Ahkam al-Sultania, Qanun al-Wazarah, dan Kitab Nasihat al-Mulk. Buku-buku membahas prinsip-prinsip ilmu politik, dengan referensi khusus dengan fungsi dan tugas khalifah, menteri utama, menteri lainnya, hubungan antara berbagai elemen masyarakat dan sktor dan langkah-langkah untuk memperkuat pemerintah dan memastikan kemenangan dalam perang. Dua dari buku-buku ini, al-Ahkam al-Sultania dan Qanun al-Wazarah telah dipublikasikan dan juga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ia dianggap sebagai penulis / pendukung dari 'Doktrin Kebutuhan' dalam ilmu politik. Dengan demikian ia mendukung sebuah kekhalifahan yang kuat dan kekuasaan terbatas putus asa didelegasikan kepada Gubernur, yang cenderung untuk membuat kekacauan. Di sisi lain, ia telah menetapkan prinsip-prinsip yang jelas untuk pemilihan khalifah dan kualitas dari pemilih, kepala di antaranya adalah pencapaian tingkat tingkat intelektual dan kemurnian karakter.

Dalam etika, ia menulis Kitab al-Aadab Dunya wa al-Din, yang menjadi buku populer pada subjek dan masih dibaca di beberapa negara Islam.

Al-Mawardi telah dianggap sebagai salah satu pemikir paling terkenal dalam ilmu politik di abad pertengahan. karya aslinya mempengaruhi perkembangan ilmu ini, bersama dengan ilmu sosiologi, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Ibnu Khaldun

- **CLIFFORT GEERZT**

Clifford James Geertz (San Francisco, 23 Agustus 1926–Philadelphia, 30 Oktober 2006) adalah seorang ahli antropologi asal Amerika Serikat. Ia paling dikenal melalui penelitian-penelitiannya mengenai Indonesia dan Maroko dalam bidang seperti agama (khususnyaIslam), perkembangan ekonomi, struktur politik tradisional, serta kehidupan desa dan keluarga. Terkait kebudayaan Jawa, ia memopulerkan istilah *priyayi* saat melakukan penelitian tentang masyarakat Jawa pada tahun 1960-an, dan mengelompokkan masyarakat Jawa ke dalam tiga golongan: *priyayi*, *santri* dan *abangan*.

Antara karya-karyanya adalah:

- *The Religion of Java*
- *Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia*
- *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*
- *Negara: The Theatre State in 19th-Century Bali*
- *The Politics of Culture, Asian Identities in a Splintered World*

Sejak tahun 1970 hingga meninggal dunia Geertz menjabat sebagai profesor emeritus di Fakultas Ilmu Sosial di Institute for Advanced Study. Ia juga pernah menjabat sebagai profesor tamu di Departemen Sejarah Universitas Princeton dari 1975 hingga 2000.

- **MAX WEBER**

Max Weber, ahli sosiologi dan sejarah bangsa Jerman, lahir di Erfurt, 21 April 1864 dan meninggal dunia di Munchen, 14 Juni 1920. Weber adalah guru besar di Freiburg (1894-1897), Heidelberg (sejak 1897), dan Munchen (1919-1920).
Teori dan karangannya membantu meletakkan dasar-dasar sosiologi modern. Ia berpendapat bahwa birokrasi merupakan corak terpenting masyarakat modern, metode organisasi yang didasarkan pada pengkhususan tugas, tindakan menurut aturan dan aturan kekuasaan yang mantap

- **MICHEL FOUCAULT**

Paul-Michel Foucault (lahir di Poitiers, 15 Oktober 1926 – meninggal di Paris, 25 Juni1984 pada umur 57 tahun) adalah seorang filsuf Perancis, sejarahwan, intelektual, kritikus, dan sosiolog. Semasa hidupnya, ia memegang kursi jabatan di Collège de France, karena karyanya yang berjudul *Sejarah sistem pemikiran* (*History of Systems of Thought*) dan juga mengajar di Universitas California, Berkeley.

Foucault paling dikenal dengan penelitian tajamnya dalam bidang institusi sosial, terutama psikiatri, kedokteran, ilmu-ilmu kemanusiaan dan sistem penjara, dan karya-karyanya tentang sejarah seksualitas. Karyanya yang menelaah kekuasaan dan hubungan antarakekuasaan, pengetahuan dan diskursus telah banyak diperdebatkan secara luas.

Pada tahun 60-an Foucault sering diasosiasikan dengan gerakan strukturalis. Foucault kemudian menjauhkan dirinya dari gerakan pemikiran ini. Meski sering dikarekterisasikan sebagai seorang posmodernis, Foucault selalu menolak label Posstrukturalis dan posmodernis.

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan PKB di DIY didirikan?
2. Siapa saja yang ikut andil dalam berdirinya PKB di Yogyakarta?
3. Menurut pandangan anda, bagaimana pengurus PKB Yogyakarta memaknai dan memahami ideologi PKB? Lalu apa saja contoh pemaknaan dan pemahaman ideologi PKB yang telah teraplikasi dalam tindakan nyata?
4. Adakah intervensi Kiai dalam pemaknaan ideologi tersebut?
5. Jika ya, contohnya seperti apa?
6. Dalam garis perjuangan PKB di Yogyakarta, kegiatan apa yang sudah dan akan dilakukan?
7. Setahu anda, bagaimana dinamika konflik internal PKB khusunya di Yogyakarta? Serta apakah yang melatarbelakangi konflik tersebut?
8. Apa saja konflik, terutama internal yang pernah terjadi di PKB Yogyakarta?
9. Bagaimana mekanisme penyelesaian konflik tersebut?
10. Lalu dimanakah dan bagaimankah peran kiai dalam konflik tersebut?
11. Apa dampak adanya konflik tersebut terhadap PKB?

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KH. MASRUR AHMAD .MZ

Alamat : Cangkringan

Menyatakan bahwa telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan mahasiswi:

Nama : Tsaniyatul Azizah

NIM : 08370009

Jurusan/Semester: Jinayah Siyasah/VIII

Fakultas/Univ : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Judul Skripsi : *KUASA KIAI DALAM KONTESTASI PEMAKNAAN PKB*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2012

Yang Menyatakan

(KH. MASRUR AHMAD. MZ.)

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-06 / RO

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHR HAFIDZ ABD QODIR

Alamat :

Menyatakan bahwa telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan mahasiswi:

Nama : Tsaniyatul Azizah

NIM : 08370009

Jurusan/Semester: Jinayah Siyasah/VIII

Fakultas/Univ : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Judul Skripsi : *KUASA KIAI DALAM KONTESTASI PEMAKNAAN PKB*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2012

Yang Menyatakan

KHR. HAFIDH ABD. QODIR

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Riyanto, SHI

Alamat : Komplek POLRI Gowok Blok E2 NO : 225

Menyatakan bahwa telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan mahasiswi:

Nama : Tsaniyatul Azizah

NIM : 08370009

Jurusan/Semester: Jinayah Siyasah/VIII

Fakultas/Univ : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Judul Skripsi : *KUASA KIAI DALAM KONTESTASI PEMAKNAAN PKB*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2012

Yang Menyatakan

(Achmad Riyanto, SHI)

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-06 / RO

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KH MOH YASIN NAWAWI

Alamat :

Menyatakan bahwa telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan mahasiswi:

Nama : Tsaniyatul Azizah

NIM : 08370009

Jurusan/Semester: Jinayah Siyasah/VIII

Fakultas/Univ : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Judul Skripsi : *KUASA KIAI DALAM KONTESTASI PEMAKNAAN PKB*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2012

Yang Menyatakan

(KH. MOH YASIN NAWAW)

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Djawis

Alamat :

Menyatakan bahwa telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan mahasiswi:

Nama : Tsaniyatul Azizah

NIM : 08370009

Jurusan/Semester: Jinayah Siyasah/VIII

Fakultas/Univ : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Judul Skripsi : *KUASA KIAI DALAM KONTESTASI PEMAKNAAN PKB*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2012

Yang Menyatakan

(M. Djawis)

Lampiran 5

Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB)
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Priode 2011 – 2016

MUSTASYAR

1. K.H. Zamakhsyari
2. K.H. Mabarun
3. K.H. Hamin Noor Yosef
4. H.M.S. Gandung Sifa' Prawoto

DEWAN SYURA

Ketua	: **K.H. Masrur Ahmad MZ.**
Wakil Ketua	: H. Sukamto, S.H.
Wakil Ketua	: K.H. Muhammad Djawis Masruri
Wakil Ketua	: K.H. Abdul Hafidh
Sekretaris	: **H. Abdul Halim Muslih**
Wakil Sekrtaris	: H. Amin Muhaimin
Wakil Sekretaris	: Mifta'im An'am
Anggota	: K.H. Mashudi Marzuqi
Anggota	: K.H. Moh. Yasin
Anggota	: K.H. Abdul Karim
Anggota	: K.H. M. Wajidil Minan
Anggota	: K.H. Muhammad Rifqi, S. Ag.
Anggota	: Binti Rosyidah
Anggota	: Drs. Ibnu Hadjar, S.H., M.I.S.
Anggota	: Drs. H. Achmad Supono
Anggota	: H. M. Abdul Kowi
Anggota	: Dra. Dyah Isti Narmiyanti

DEWAN TANFIDZ

Ketua	: **H. Agus Sulistiyono, S.E.**
Wakil Ketua	: Sukoyo, S. Ag.
Wakil Ketua	: Drs. H. Muhammad. Idris, P, M.M.
Wakil Ketua	: Ir. Bambang Adhyaksa, M.E.
Wakil Ketua	: Drs. H. Heri Kuswanto, M. Si.
Wakil Ketua	: Dr. Drs. H. A.. Fauzan Asmara, M.M.
Wakil Ketua	: Ahmad Yubaidi, SH., S. Pd., CN.
Wakil Ketua	: Hidayatut Thoyyibah, S. Ag.
Wakil Ketua	: Hj. Endang Setyani, S.H.
Wakil Ketua	: Drs. H. Suharyanto SW.
Wakil Ketua	: Marita, SE., M.M.
Wakil Ketua	: Sudaryanto, SH,. M. Hum.

Wakil Ketua : Siti Mukarromah
Wakil Ketua : Hj. Riyaningsih, SE.
Wakil Ketua :Titoniyah

Sekretaris : **Umaruddin Masdar**
Wakil Sekretaris : Fitroh Nurwijoyo Legowo, SPd. Si.
Wakil Sekretaris : Nunut Rubiyanto, S. Si., Apt.
Wakil Sekretaris : H. Fairuz Ahmad, S.Ag.
Wakil Sekretaris : Izzatul Islamiyah, S.E.I.
Wakil Sekretaris : Moch. Jauharul La'ali, S. Ag.
Wakil Sekretaris : Nurus Syaifuddin Al Anshory
Wakil Sekretaris : Wita Isriyanti, S.E.
Wakil Sekretaris : Anwar, S. Th.I.
Wakil Sekretaris : Siti Fasiha, S. Ag.
Wakil Sekretaris : Achmad Riyanto, S.H.I.
Wakil Bendahara : Jakfar Shodik, S. Th.I.
Wakil Sekretaris : Rukmini, S.H.I.
Wakil Sekretaris : Tanti Ristiyana, A.Md. Kep.

Bendahara : **Hj. Urul Aini**
Wakil Bendahara : Hj. Siti Nurjani
Wakil Bendahara : Nur Eni Rahayu, S.E.
Wakil Bendahara : Zahrotun
Wakil Bendahara : Rahayu Widi Nuryani, S.H.
Wakil Bendahara : Sri Wahyuni, S.T., S.E.
Wakil Bendahara : Al Mas'udah, S.H.I.
Wakil Bendahara : Ratih Siti Puspita
Wakil Bendahara : Joni Suherman
Wakil Bendahara : Erma Suratmi Fauzi
Wakil Bendahara : Ristiyanta
Wakil Bendahara : Sumiatun

Lampiran 6

Mabda Siyasi

1. Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur sejahtera lahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain didunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
2. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (as-shidqu), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (al-‘adalah), tolong menolong dalam kebajikan (al-ta’awun) serta konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (al-istiqomah) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (al-syuro) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara didepan hukum (al-musawa) adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan.
3. Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya. Yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan (hifdzu al-Nafs), terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama (hifdzu al-din), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (hifdzu al-Aql), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (hifdzu al-nasl) dan terpeliharanya harta benda (hifdzu al-mal). Misi ini ditempuh dengan pendekatan amar ma’ruf nahi munkar yakni menyerukan kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemunkaran.
4. Penjabaran dari misi yang di emban guna mencapai terwujudnya masyarakat yang dicitakan tersebut tidak bisa tidak harus dicapai melalui keterlibatan penetapan kebijakan publik. Jalur kekuasaan menjadi amat penting ditempuh dalam proses mempengaruhi pembuatan kebijakan

publik melalui perjuangan pemberdayaan kepada masyarakat lemah, terpinggirkan dan tertindas, memberikan rasa aman, tenteram dan terlindungi terhadap kelompok masyarakat minoritas dan membongkar sistem politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya yang memasung kedaulatan rakyat. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, upaya mengartikulasikan garis perjuangan politiknya dalam jalur kekuasaan menjadi hal yang niscaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Partai Kebangkitan Bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan itu sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada diri manusia merupakan titipan dan amanat Tuhan yang dititipkan kepada manusia yang oleh manusia hanya bisa diberikan pada pihak lain yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengemban dan memikulnya. Keahlian memegang amanat kekuasaan itu mensaratkan kemampuan menerapkan kejujuran, keadilan dan kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat.

6. Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu menebarkan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta. Manifestasi kekuasaan itu harus dipergunakan untuk memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dengan lebih maslahat. Partai Kebangkitan Bangsa berketetapan bahwa kekuasaan yang hakekatnya adalah amanat itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan dan dapat dikontrol pengelolaannya oleh rakyat. Kontrol terhadap kekuasaan itu hanya mungkin dilakukan manakala kekuasaan tidak tak terbatas dan tidak memusat di satu tangan, serta berada pada mekanisme sistem yang institusionalistik, bukan bertumpu pada kekuasaan individualistik, harus selalu dibuka ruang untuk melakukan kompetisi kekuasaan dan perimbangan kekuasaan sebagai arena mengasah ide-ide perbaikan kualitas bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Pemahaman atas hal ini tidak hanya berlaku saat memandang kekuasaan dalam tatanan kenegaraan, melainkan juga harus terefleksikan dalam tubuh internal partai.

7. Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tatanan kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut haruslah dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan tali persaudaraan antar sesama yang terikat dengan ikatan keagamaan (ukhuwah diniyah), kebangsaan (ukhuwah wathoniyah), dan kemanusiaan (ukhwuah insaniyah), dengan selalu menjunjung tinggi semangat akomodatif, kooperatif dan integratif, tanpa harus saling dipertentangkan antara sesuatu dengan yang lainnya.

8. Partai Kebangkitan Bangsa bercirikan humanisme religius (insaniyah diniyah), amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis, yang berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-cara yang santun dan akhlak karimah. Partai adalah ladang persemaian untuk mewujudkan masyarakat beradab yang dicitakan, serta menjadi sarana dan wahana sekaligus sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan bangsa. Partai dalam posisi ini berkehendak untuk menyerap, menampung, merumuskan, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil dan demokratis.
9. Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras, dan lintas golongan yang dimanestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa bersifat independen dalam pengertian menolak segala bentuk kekuasaan dari pihak manapun yang bertentangan dengan tujuan didirikannya partai.

Lampiran 7

Naskah Deklarasi

NASKAH DEKLARASI

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani; bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri; bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan; serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama.

Bahwa dalam kurun tiga dasawarsa terakhir ini, perjuangan bangsa mencapai cita-cita tersebut terasa semakin jauh dari yang diharapkan. Pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya telah mengabaikan faktor rakyat sebagai pemegang kedaulatan, pengingkaran terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut telah melahirkan praktik kekuasaan tidak terbatas dan tidak terkendali, yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat.

Bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut serta mencegah terulangnya kesalahan serupa dimasa mendatang, diperlukan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Didalam tatanan kehidupan yang demokratis itu, warga Jam’iyah Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari bangsa Indonesia bertekad untuk bersama komponen bangsa lain mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, berakhlak mulia dan bermartabat melalui suatu wadah partai politik.

Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga Jam’iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang

bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa.

Jakarta, 29 Rabiul Awwal 1419 H/23 Juli 1998 M

Para Deklarator

MUNASIR ALI
ILYAS RUCHIYAT
ABDURRAHMAN WAHID
A. MUSTOFA BISRI
A. MUHITH MUZADI

Lampiran 8

LAMBANG PKB DAN MAKNANYA

(1) Arti Gambar adalah sebagai berikut:

a) Sembilan bintang bermakna idealisme partai yang memuat 9 (sembilan) nilai, yaitu kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran, kerakyatan, persamaan, kesederhanaan, keseimbangan, dan persaudaraan.

b) Tulisan nama Partai dan singkatannya bermakna identitas diri partai yang berfungsi sebagai sarana perjuangan aspirasi politik rakyat Indonesia yang memiliki kehendak menciptakan tatanan kehidupan bangsa yang demokratis;

c) Bingkai segi empat dengan garis ganda yang sejajar bermakna garis perjua ngan Partai yang menempatkan orientasi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, lahir dan batin, secara sejajar.

(2) Arti warna adalah sebagai berikut :

a) Putih, bermakna kesucian, ketulusan dan kebenaran yang menjadi etos perjuangan partai;

b) Hijau, bermakna kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tujuan perjuangan

c) Kuning, bermakna kebangkitan Bangsa yang menjadi nuansa pembaharuan dan berpijak pada kemaslahatan umat manusia.

Lampiran 9

Berikut data hasil perolehan suara pada Pemilihan Umum di DIY:[1]

PROSENTASE PEROLEHAN SUARA PKB DIY
(Berdasarkan Suara DPR RI, DPRD PROV dan DPRD Kab/Kota)

No	Basis Suara	Perolehan Suara	Prosentase
1	DPR RI	80.285	**3,99 %**
2	DPRD Provinsi	126. 399	**6,29 %**
3	DPRD Kab/Kota	107.134	**5,51 %**

Data Perolehan Suara PKB Per Kab./Kota
(Caleg Provinsi): DI Yogyakarta

Kab./Kota	**Memilih Caleg**	**Memilih Partai**	**Jumlah**	**Total Suara Se-Kab/Kota**	**Prosentase Perolehan PKB**	**Suara & Kursi**	**Target 2014**
Kota Yogyakarta	642	440	1.082	220.316	0,49 %	BPP = 28.596 0 Kursi	
Bantul	18.102	5.974	24.076	527.989	4,55 %	BPP = 32.750 **1 Kursi**	
Kulon Progo	21.092	3.549	24.641	253.045	9,73 %	BPP = 36.609 **1 Kursi**	
Sleman	51.839	7.064	58.903	569.955	10,33 %	BPP = 31.251 **2 Kursi**	**2 Kursi**
Gunungkidul	14.138	3.559	17.697	436.021	4,05 %	BPP = 31.447 **1 Kursi**	**1 Kursi**
Jumlah Total			**126.399**	**2.007.326**	**6,29 %**	**5 Kursi**	

DATA PEROLEHAN SUARA PKB PROV. DIY
(Berdasarkan Hasil Perolehan Suara DPR RI)

I. Hasil Pemilu '99

No	**Kab./Kota**	**Perolehan PKB**	**Jumlah Suara se-Kab./Kota**	**Prosentase PKB**
1	Kota Yogyakarta	11.290	255.786	4,41 %
2	Bantul	87.364	504.713	17,30 %
3	Sleman	73.069	574.339	12,72 %
4	Gunungkidul	43.517	413.088	10,53 %
5	Kulonprogo	42.000	254.058	16,53 %
Jumlah Total		**257.240**	**2.001.984**	**12,84 %**

[1] Arsip DPW PKB DIY

II. Hasil Pemilu 2004

No	Kab./Kota	Perolehan PKB	Jumlah Suara se-Kab./Kota	Prosentase PKB
1	Kota Yogyakarta	11.511	228.916	5,02 %
2	Bantul	85.931	506.028	16,98 %
3	Sleman	103.201	552.091	18,69%
4	Gunungkidul	46.259	405.574	19,93 %
5	Kulonprogo	45.925	232.038	19,79 %
Jumlah Total		**292.827**	**1.924.647**	**15,21 %**

III. Hasil Pemilu 2009

No	Nama	Kota Yogya	Kab. Bantul	Kulon Progo	Kab. Sleman	Gunung Kidul	Jumlah
1	PKB (memilih Partai)	438	6.282	4.316	7.375	3.806	22.217
2	Agus Sulistiono	341	6.340	6.060	8.687	5.087	26.515
3	Soeharno	242	4.397	4.474	6.397	3.878	19.370
4	Titi Patiha	51	682	614	964	811	3.122
5	Jazim Asari	45	633	2.382	798	315	4.173
6	Nur Budi H	28	315	681	613	413	2.050
7	Barokah IS	18	209	231	258	119	835
8	Nur Akhmad A	36	377	924	536	130	2.003
Jumlah Total		**1.199**	**19.235**	**19.682**	**25.610**	**14.559**	**80.285**

Data Perolehan Suara PKB Per Kecamatan (Caleg Kota/Kab.): Kab Sleman

No	Kecamatan	Memilih Caleg	Memilih Partai	Jumlah	Total Suara Se-Kecamatan	Prosentase Perolehan PKB	Suara & Kursi	Target 2014
1	Sleman	2870	355	3.225	37.829	8,52 %	BPP = 10.487 PKB = 8.930 **1 Kursi**	**2 Kursi**
2	Tempel	4152	533	4.685	32.180	14,55 %		
3	Ngaglik	804	213	1.017	43.581	2,34 %		
4	Turi	923	188	1.111	21.407	5,18 %	BPP = 10.602 PKB = 3.454 **0 Kursi**	**1 Kursi**
5	Pakem	457	109	566	21.486	2,63 %		
6	Cangkringan	560	135	695	18.176	3,82 %		
7	Ngemplak	799	283	1.082	21.561	5,01 %		
8	Kalasan	4242	524	4.766	40.171	11,86 %	BPP = 12.839 PKB = 8.749 **1 Kursi**	**1 Kursi**
9	Berbah	1577	223	1.800	27.820	6,47 %		
10	Prambanan	1876	307	2.183	28.831	7,57 %		
11	Depok	7264	750	8.014	61.373	13,05 %	BPP = 7.135 PKB =	**1 Kursi**

							8.014 **1 Kursi**	
12	Mlati	2621	442	3.063	45.578	6,72 %	BPP = 9.746 PKB = 6.409 **1 Kursi**	**1 Kursi**
13	Gamping	2905	441	3.346	51.035	4,59 %		
14	Seyegan	3500	374	3.874	26.858	14,42 %	BPP = 12.346 PKB = 6.009 **1 kursi**	**1 Kursi**
15	Godean	375	174	549	38.938	1,40 %		
16	Minggir	787	129	916	20.090	4,55 %		
17	Moyudan	557	113	670	21.041	3,09 %		
Jumlah Total				**41.562**	**557.955**	**7,44 %**	**5 Kursi**	**7 Kursi**

Data Perolehan Suara PKB Per Kecamatan (Caleg Kota/Kab.): Kab Bantul

No	Kecamatan	Memilih Caleg	Memilih Partai	Jumlah	Total Suara Se-Kec.	Prosentase Perolehan PKB	Suara & Kursi	Target 2014
1	Bantul	2.167	391	2.558	33.752	7,57 %	BPP= 10.641 PKB= 4.309 **1 Kursi**	**1 Kursi**
2	Bambanglipuro	268	143	411	24.608	1,67 %		
3	Jetis	1.061	279	1.340	36.617	3,65 %		
4	Pajangan	703	265	968	20.111	4,81 %	BPP= 10.112 PKB= 3.593 **0 Kursi**	**1 Kursi**
5	Sedayu	483	269	752	26.409	2,84 %		
6	Kasihan	1.590	283	1.873	53,384	3,50 %		
7	Sewon	1.905	466	2.371	53.552	4,42 %	BPP= 9.755 PKB= 3.950 **1 Kursi**	**1 Kursi**
8	Banguntapan	1.316	263	1.579	54.558	2,89 %		
9	Pleret	2.468	473	2.941	26.272	11,19 %	BPP= 11.588 PKB= 7.788 **1 Kursi**	**2 Kursi**
10	Imogiri	2.106	395	2.501	37.063	6,74 %		
11	Dlingo	1.052	155	1.207	23.355	5,16 %		
12	Piyungan	853	286	1.139	28.802	3,95 %		
13	Pundong	312	186	498	21.182	2,35 %	BPP= 10.728 PKB= 3.551 **0 Kursi**	**1 Kursi**
14	Kretek	142	90	232	18.716	1,23 %		
15	Sanden	982	111	1.093	19.796	5,52 %		
16	Srandakan	291	121	412	19.861	2,07 %		
17	Pandak	1.261	355	1.616	29.931	5,39 %		
Jumlah Total				**23.491**	**474.638**	**4,94 %**	**3 Kursi**	**6 Kursi**

Data Perolehan Suara PKB Per Kecamatan
(Caleg Kota/Kab.): Kab Kulonprogo

No	Kecamatan	Memilih Caleg	Memilih Partai	Jumlah	Total Suara Se-Kec.	Prosentase Perolehan PKB	Suara dan Kursi	Target 2014
1	Girimulyo	1431	187	1.568	15.001	10,45 %	BPP= 5.696 PKB= 4.442 **1 Kursi**	**2 Kursi**
2	Samigaluh	1637	188	1.825	17.211	10,60 %		
3	Kalibawang	837	212	1.049	17.523	5,98 %		
4	Sentolo	2259	438	2.697	29.397	9,17 %	BPP= 6.053 PKB= 3.333 **1 Kursi**	**1 Kursi**
5	Nanggulan	512	124	636	18.183	3,49 %		
6	Pengasih	2059	270	2.329	27.770	8,38 %	BPP = 5.534 PKB = 4.853 **1 Kursi**	**2 Kursi**
7	Kokap	2217	307	2.524	20.696	12,19 %		
8	Temon	2430	277	2.707	15.794	17,13 %	BPP = 5.934 PKB = 9.820 **2 Kursi**	**3 Kursi**
9	Wates	2250	190	2.440	27.136	8,99 %		
10	Panjatan	4399	274	4.673	21.645	21,58 %		
11	Lendah	1.098	191	1.289	24.302	5,30 %	BPP = 8.478 PKB = 3.315 **1 Kursi**	**1 Kursi**
12	Galur	1746	280	2.026	19.386	10,45 %		
Jumlah Total				**25.763**	**254.044**	**10,14 %**	**6 Kursi**	**9 Kursi**

Data Perolehan Suara PKB Per Kecamatan
(Caleg Kota/Kab.): Kab Gunungkidul

No	Kecamatan	Memilih Caleg	Memilih Partai	Jumlah	Total Suara Se-Kec	Prosentase Perolehan PKB	Suara & Kursi	Target 2014
1	Semanu	557	157	714	33.728	2,11 %	BPP = 8.761 PKB = 6.167 **1 Kursi**	**2 Kursi**
2	Wonosari	2473	256	2.729	48.796	5,59 %		
3	Playen	2313	411	2.724	34.022	8,006 %		
4	Patuk	396	154	550	18.885	2,91 %	BPP = 9.004 PKB = 3.239	**1 Kursi**
5	Gadingsari	1709	233	1.942	21.533	9,01 %		
6	Nglipar	352	106	458	18.668	2,45 %		
7	Ngawen	228	61	289	19.606	1,47 %		

							1 Kursi	
8	Semin	713	132	345	30.724	1,12 %	BPP = 8.799 PKB = 2.860 0 Kursi	**1 Kursi**
9	Karangmojo	380	113	493	31.997	1,54 %		
10	Ponjong	1225	297	1.522	33.518	4.54 %		
11	Rongkop	1891	395	2.286	18.967	12,05 %	BPP = 8.277 PKB = 4.844 **1 Kursi**	**1 Kursi**
12	Girisubo	1431	363	1.794	14.852	12,07 %		
13	Tepus	242	71	313	22.611	1,38 %		
14	Tanjungsari	380	71	451	17.448	2,58 %		
15	Paliyan	962	174	1.136	19.111	5,9 %	BPP = 9.019 PKB = 1.872 0 Kursi	**1 Kursi**
16	Saptosari	265	63	328	22.434	1,46 %		
17	Panggang	133	41	174	16.872	1,03 %		
18	Purwosari	186	58	234	12.438	1,89 %		
Jumlah Total				**14.482**	**436.210**	**3,31 %**	**3 Kursi**	**6 Kursi**

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

TÜVRheinland CERT ISO 9001

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.1/839 /2012
Sifat : Segera
Lamp. : 1 exemplar
Perihal : Permohonan ijin penelitian

Yogyakarta, 25 April 2012

Kepada
Yth. Gubernur DIY
c.q. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Komplek Kepatihan Danurejan
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka memenuhi tugas akhir perkuliahan (pembuatan skripsi) berjudul : **Kuasa Kiai dalam Kontestasi Pemaknaan Partai Kebangkitan Bangsa** yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berikut ini :

Nama	:	**TSANIYATUL AZIZAH**
NIM.	:	08370009
Jurusan	:	Jinayah Siyasah (JS)

dengan ini Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Gubernur DIY, c.q. Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah Propinsi DIY, kiranya berkenan memberikan surat pengantar dan izin penelitian ke beberapa tempat yaitu :

1. Pengurus DPW PKB Yogyakarta (Permohonan ijin penelitian dan wawancara)
2. Fraksi PKB DPRD Tk.I Propinsi D.I.Yogyakarta (Permohonan wawancara).

Demikian surat permohonan kami, atas izin tersebut kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/4046/V/4/2012

Membaca Surat	:	Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Yk	Nomor	:	UIN.02/DS/PP.00.1/839/2012
Tanggal	:	25 April 2012	Perihal	:	Permohonan Ijin Penelitian

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama	:	TSANIYATUL AZIZAH	NIP/NIM	:	08370009
Alamat	:	Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta			
Judul	:	KUASA KIAI DALAM KONTESTASI PEMAKNAAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
Lokasi	:	- Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA			
Waktu	:	26 April 2012 s/d 26 Juli 2012			

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 26 April 2012
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETDA 5

Ir. Joko Wuryantoro, M.Si
NIP. 19580108 198603 1 011

Tembusan :
1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq. Dinas Perizinan
3. Ketua DPRD Provinsi DIY
4. Ketua Fraksi PKB Tk. I Provinsi DIY
5. Ketua DPW PKB Yogyakarta
6. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Yk
7. Yang Bersangkutan

CURRICULUM VITAE

Nama	**: Tsaniyatul Azizah**
Tempat Tanggal Lahir	**: Nganjuk, 10 Januari 1990**
Alamat Asal	**:Jln. Pattimura No: 138 RT/RW 01/03 Wates- Baron – Nganjuk**
Email	**: tsaniyatulazizah@rocketmail.com**
Alamat Yogyakarta	**: Jln. Timoho Gang Genjah 8A Ngentak-Sapen Baru-Sleman**
Nama Ayah	**: M. Maliki. BA**
Nama Ibu	**: Istiqomah**
Alamat	**:Jln. Pattimura No: 138 RT/RW 01/03 Wates- Baron – Nganjuk**

- **Riwayat Pendidikan Formal:**

1994- 1996	**TK Aisyiyyah Bustanul Athfal**
1996- 2002	**SDN Baron III**
2002- 2005	**MTsN Tambakberas Jombang**
2005- 2008	**MAN Tambakberas Jombang**
2008- sekarang	**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

- **Riwayat Pendidikan Non-Formal**

2002-2008 Pondok Pesantren Putri An-Najiyah Bahrul Ulum Tambakberas Jombang

- **Pengalaman Organisasi**

2003-2004	**OSIS MTsN Tambakberas Jombang (koord. Bidang Kesenian)**
2006-2007	**OSIS MAN Tambakberas Jombang (Bendahara Umum)**
2009-2010	**BEM – J Jinayah Siyasah Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Suka (Wakil Sekretaris)**
2012-sekarang	**Senat Mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Suka (Sekretaris Jenderal)**